



URGENSI IMPLEMENTASI LAPORAN KEBERLANJUTAN PADA SEKTOR PEMERINTAH

Rizky Amalia¹⁾; Amrie Firmansyah^{2)*}

¹⁾ 4132220051_kiky@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ amriefirmansyah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*)Penulis Korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor Pemerintah Indonesia. Pendekatan *scoping review* dipilih dalam penelitian ini dengan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Sumber data berasal dari artikel-artikel penelitian, buku, website dan referensi ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan telah diterapkan oleh instansi pemerintah di berbagai negara terutama pada pemerintah daerah. Pelaporan keberlanjutan juga memberikan banyak manfaat. Selain efisiensi anggaran, pengungkapan laporan keberlanjutan adalah wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor pemerintah perlu direncanakan dengan baik terutama oleh Pemerintah sebagai regulator, agar dapat meminimalisasi risiko seperti ketidakkonsistenan dalam penyusunan laporan keberlanjutan tahunan. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa instansi pemerintah dalam bidang pengawasan dan pemeriksa dapat menjadi pionir dalam penerapan pelaporan keberlanjutan di sektor publik. Penelitian ini menyediakan literatur ulasan potensi implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor pemerintahan.

Kata Kunci: *Laporan Keberlanjutan, Pemerintah Indonesia, Urgensi Implementasi*

Abstract

This research analyzes the urgency of implementing sustainability reporting in the Indonesian Government sector. A scoping review approach was chosen for this research, with documentation as a data collection technique. Data sources come from research articles, books, websites, and other scientific references. The results of this research show that sustainability reports have been implemented by government agencies in various countries, especially local governments. Sustainability reporting also provides many benefits. Besides budget efficiency, disclosing sustainability reports is a form of transparency and accountability towards the environment and society. However, the implementation of sustainability reporting in the government sector needs to be planned well, especially by the Government as the regulator, to minimize risks such as inconsistencies in the preparation of annual sustainability reports. This research implies that government agencies in supervision and inspection can be pioneers in implementing sustainability reporting in the public sector. This research provides a literature review of the potential implementation of sustainability reporting in the government sector.

Keywords: *Government of Indonesia, Sustainability Report, Urgency of Implementation*

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Selain itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Menurut Pope & Lim (2020), aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dituangkan dalam laporan keberlanjutan akan meningkatkan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Popli et al (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang mampu mengoordinasikan respon perusahaan atas lingkungan eksternal akan mencegah penurunan kinerja keuangan.

Regulasi atas penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang saat ini lebih banyak dinamakan dengan keberlanjutan, lebih banyak mengatur sektor korporasi. Pemerintah sebagai regulator belum mengatur mengenai kewajiban implementasi keberlanjutan pada instansi di sektor pemerintah. Pelaporan keberlanjutan merupakan wujud akuntabilitas dari suatu entitas kepada pemangku kepentingan terhadap tiga aspek penting yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Implementasi keberlanjutan di sektor pemerintah juga sejalan dengan



konsep pada *Sustainability Development Goals* (SDGs). Selain itu, implementasi keberlanjutan dan yang dituangkan dalam laporan keberlanjutan merupakan wujud akuntabilitas pemerintah terhadap aspek ekonomi, lingkungan dan sosial

Standar GRI yang merupakan salah satu standar dalam penyusunan laporan keberlanjutan menyatakan bahwa laporan keberlanjutan merupakan praktik pelaporan organisasi secara terbuka akan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan/atau sosial, termasuk juga kontribusi positif atau negatifnya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (GRI, 2016). Di sisi lain, pelaporan keberlanjutan di Indonesia belum bersifat wajib dilaksanakan (*mandatory*). Adapun instansi sektor pemerintah yang telah menyusun laporan keberlanjutan adalah BPK di tahun 2020.

Terbatasnya regulasi yang mengatur implementasi di sektor pemerintahan mengakibatkan rendahnya laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Padahal laporan keberlanjutan merupakan cerminan aktivitas sosial, lingkungan dan ekonomi oleh suatu entitas termasuk instansi pemerintah yang berguna bagi pemangku kepentingan. Informasi dalam laporan keberlanjutan mencerminkan bahwa aktivitas-aktivitas ekonomi yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah telah mengakomodasi dampak lingkungan dan sosial atau belum. Selain itu, aktivitas keberlanjutan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sejalan dengan konsep SDGs sehingga kinerja keberlanjutan pemerintah akan meningkat. Namun, masih rendahnya pengungkapan dan pelaporan aktivitas lingkungan sosial dan lingkungan dalam aktivitas ekonomi pemerintah, para pemangku kepentingan belum mendapatkan informasi keberlanjutan yang lengkap. Padahal informasi keberlanjutan yang dituangkan dalam laporan keberlanjutan merupakan bentuk transparansi informasi. Selain itu, regulasi yang mengatur instansi pemerintah dalam melaporkan aktivitas keberlanjutannya masih terbatas. Oleh karena itu, ulasan atas potensi implementasi laporan keberlanjutan di sektor pemerintahan perlu dielaborasi lebih lanjut.

Beberapa penelitian sebelumnya, sebagian besar mengulas dan menguji dampak laporan keberlanjutan pada sektor korporasi. Menurut Farhana, & Adelina, (2019), laporan keberlanjutan digunakan oleh investor sebagai informasi bernilai tambah untuk membuat keputusan investasi, dan tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek saja, namun juga keuntungan jangka panjang. Informasi dalam laporan keberlanjutan juga dapat menguntungkan semua pemangku kepentingan. Penelitian Maswain (2020) menunjukkan bahwa pengungkapan pelaporan keberlanjutan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan temuan dari Kurniawan et al. (2018). Sementara itu, ulasan pelaporan keberlanjutan pada sektor pemerintah masih terbatas. Penelitian Williams et al., (2011) menyimpulkan bahwa separuh responden di Australia setuju agar pemerintah melaporkan setidaknya satu bidang keberlanjutan dengan pelaporan sosial yang paling umum. Yasbie & Barokah (2018) menyatakan bahwa laporan keberlanjutan bagi universitas maupun organisasi sektor publik lainnya mampu menunjukkan akuntabilitas dan transparansi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas lembaga di mata masyarakat. Alsayegh et al. (2023) memberikan bukti empiris bahwa pelaporan keberlanjutan memiliki dampak positif terhadap SDGs nasional. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaporan keberlanjutan tingkat negara memiliki peran positif dalam hubungan antara tata kelola nasional dan SDGs.

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas urgensi penerapan laporan keberlanjutan di sektor pemerintah Indonesia. Adapun ulasan dalam penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada sektor korporasi. Sementara itu, penelitian yang berkaitan dengan laporan keberlanjutan di sektor pemerintah Indonesia masih jarang diulas. Padahal, laporan keberlanjutan saat ini semakin dianggap sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan manajemen, praktik akuntansi, dan praktik pelaporan, baik di perusahaan maupun di sektor publik. Selain itu, sektor pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan



SDGs yang sejalan dengan konsep keberlanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menyediakan literatur yang mengulas implementasi keberlanjutan pada sektor pemerintah khususnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengidentifikasi regulasi yang dapat diterapkan pada instansi pemerintah baik di level pusat maupun di level daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa pada dasarnya tak satu pun organisasi memiliki hak untuk bertahan hidup, namun setiap kegiatan operasionalnya tergantung pada dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Strategi teori legitimasi adalah mengamankan legitimasi sebagai sumber daya yang berharga (Dowling & Pfeffer, 1975; Ashforth & Gibbs, 1990; Suchman, 1995). Teori ini dapat memotivasi pengelola organisasi atau manajer dalam melakukan pelaporan keberlanjutan. Teori legitimasi bermanfaat untuk mempelajari perilaku organisasi dan menentukan batasan norma dan nilai masyarakat dalam isu lingkungan.

Legitimasi sangat penting bagi perusahaan karena norma dan nilai masyarakat menetapkan batasan, dan reaksi terhadap batasan ini sehingga mendorong analisi perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan sekitar. (Ghozali & Chariri, 2014). Harmoni antar nilai-nilai sosial melekat dalam operasional organisasi, oleh karena itu organisasi berupaya mengembangkan standar-standar yang ada dalam tatanan sosial masyarakat karena merupakan bagian dari tatanan sosial tersebut. Keselarasan ini dianggap sebagai legitimasi. (Ghozali & Chariri, 2014). Namun, jika cita-cita sosial suatu organisasi berbeda dengan cita-cita masyarakat, maka legitimasinya akan terancam. Hal ini biasa disebut dengan *legitimacy gap* (Ghozali & Chariri, 2014). Organisasi kemudian mengurangi *legitimacy gap* dengan mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang berada dalam kendalinya. Hasilnya, pengungkapan lingkungan dan sosial, seperti pelaporan keberlanjutan, dapat membantu perusahaan mendapatkan kepercayaan publik..

Teori Pemangku Kepentingan

Teori pemangku kepentingan menyoroti pentingnya akuntabilitas organisasi yang melebihi sekadar performa keuangan atau ekonomi yang sederhana (Damayanti & Hardiningsih, 2021). Menurut teori pemangku kepentingan, perusahaan cenderung secara sukarela memberikan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial, dan intelektual mereka yang melampaui apa yang diperlukan untuk memenuhi harapan nyata para pemangku kepentingan atau apa yang diakui oleh para pemangku kepentingan.

Teori pemangku kepentingan menggabungkan isu-isu etika dan manajemen. Elemen etika memverifikasi bahwa semua pemangku kepentingan mempunyai hak atas perlakuan adil oleh organisasi, dan manajer harus menjalankan organisasi dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Teori pemangku kepentingan berpendapat bahwa keberadaan organisasi bergantung pada dukungan dari para pemangku kepentingan, sehingga kegiatan organisasi juga harus memperhitungkan persetujuan dari para pemangku kepentingan tersebut (Damayanti & Hardiningsih, 2021). Pemangku kepentingan memberikan dukungan melalui pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.

Pelaporan Keberlanjutan

Meutia (2022) menyatakan bahwa praktik pelaporan keberlanjutan telah muncul dan berkembang di tingkat global dengan karakteristik yang berbeda. Regulasi, legitimasi, dan insentif pada dasarnya merupakan isu global, namun norma dan tuntutan lokal juga berdampak pada praktik. Selain laporan keuangan, kebutuhan informasi terkait dengan perusahaan juga mencakup informasi non-keuangan yang semakin mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan (Martani et al., 2016). Selain kerusakan



lingkungan seperti perubahan iklim dan pemanasan global, masyarakat dan investor juga menginginkan informasi tentang cara dunia usaha mengelola dampak lingkungan dari operasi mereka untuk menjamin bahwa mereka bertanggung jawab secara ekologis. Pelaporan ini dimasukkan dalam laporan tahunan perusahaan atau terpisah dari laporan keuangan, dengan penekanan pada operasi non keuangan.

Di sektor swasta, pelaporan keberlanjutan merupakan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan dan menunjukkan upaya yang dilakukan dalam mempertanggungjawabkan operasi bisnisnya terhadap semua pemangku kepentingan dengan tujuan mencapai kinerja perusahaan yang berkelanjutan menuju pembangunan yang berkelanjutan (Rofelawaty, 2014). Pelaporan keberlanjutan mencakup pelaporan tentang dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan. Konsep ini sejalan dengan konsep *triple bottom line*, CSR, dan aspek lainnya (Rofelawaty, 2014). Dalam pelaporan keberlanjutan, organisasi menyajikan informasi mengenai saldo dan kinerja berkelanjutan mereka, baik yang berkontribusi negatif maupun positif terhadap pembangunan suatu negara.

Penerapan pelaporan keberlanjutan memiliki beberapa keuntungan, antara lain perusahaan menjadi lebih peduli terhadap masyarakat dan lingkungan dengan memberikan nilai tambah, meningkatkan reputasi perusahaan, mengurangi risiko yang dapat mengakibatkan kerugian, dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Kerangka Pelaporan GRI, pelaporan keberlanjutan adalah jenis laporan yang menampilkan hasil dan dampak yang terjadi di suatu perusahaan dari waktu ke waktu, dalam konteks komitmen perusahaan, pendekatan strategis, dan manajemen (GRI, 2016).

Salah satu yang menyediakan standar dalam pelaporan keberlanjutan adalah Global Reporting Initiative (GRI). GRI adalah organisasi internasional yang tujuan utamanya adalah mendorong keterbukaan dalam pengungkapan standar dan pedoman pelaporan keberlanjutan. Permintaan untuk pengungkapan yang lebih transparan dapat memberikan tekanan pada perusahaan untuk mengumpulkan, mengelola, dan berbagi informasi secara berkelanjutan. Pelaporan keberlanjutan dalam kerangka GRI memberikan manfaat seperti mengatur kinerja organisasi agar mematuhi undang-undang, norma, inisiatif sukarela, standar kinerja, dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pelaporan keberlanjutan dengan menggunakan standar GRI memungkinkan perbandingan kinerja organisasi dari periode ke periode dan menunjukkan komitmen organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan (GRI, 2016).

Laporan keberlanjutan mempunyai beberapa tujuan. Pertama, berfungsi sebagai alat untuk membandingkan dan menilai kinerja jangka panjang sesuai dengan undang-undang, norma, kode etik, standar kinerja, dan peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi non-pemerintah dan entitas lainnya. Kedua, untuk menggambarkan kontribusi organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Ketiga, membandingkan kinerja organisasi dengan periode yang lalu atau dengan perusahaan lain.

SDGs (*Sustainable Development Goals*)

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, yang sering dikenal sebagai SDGs, adalah kesepakatan pembangunan baru yang berupaya memandu transformasi menuju hak asasi manusia dan kesetaraan. SDGs mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Bappenas, nd). Metode SDGs didasarkan pada prinsip universal, integratif, dan inklusif untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal, atau "*No-one Left Behind*". SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang bertujuan untuk mempertahankan dan mencapai tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang berakhir pada tahun 2015. (Bappenas, nd).

SDGs memiliki empat pilar. Pertama, Pilar Pembangunan Sosial yang bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak dasar manusia secara adil dan setara dan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kedua, Pilar Pembangunan Lingkungan bertujuan untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagai



pendukung keberlangsungan seluruh kehidupan. Ketiga, Pilar Pembangunan Ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui peluang kerja dan usaha yang berkelanjutan, inovasi, industri inklusif, infrastruktur yang memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung oleh kemitraan dan keempat Pilar Pembangunan Hukum dan Tata kelola yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif, guna menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *scoping review*. Penelitian ini memanfaatkan data dari berbagai sumber referensi, antara lain publikasi jurnal dan website resmi. Scoping review merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk menemukan literatur secara mendalam dan ekstensif dari berbagai sumber yang terkait dengan permasalahan kajian (Arksey & O'Malley, 2005). Tujuan dari *scoping review* adalah untuk menjawab pertanyaan subjek penelitian dengan mengumpulkan beragam sumber publikasi penelitian yang sebanding dan membuat pemetaan untuk membuat kesimpulan. Pendekatan *scoping review* yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model Arksey dan O'Malley (2015) yang terdiri dari beberapa tahapan: merumuskan pertanyaan penelitian, mencari studi yang relevan, memilih studi, memetakan data dengan tabel, menyusun, merangkum, dan melaporkan hasil.

Identifikasi Pertanyaan Penelitian

Rumusan pertanyaan penelitian dengan menggunakan konsep *P (Population)*, *C (concept)*, *C (Context)*. Tabel berikut merupakan uraian konsep PCC yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. PCC Penelitian

<i>P (Population)</i>	<i>Government sector, Indonesia</i>
<i>C (concept)</i>	<i>Implementation, Development</i>
<i>C (Context)</i>	<i>Sustainability Reporting</i>

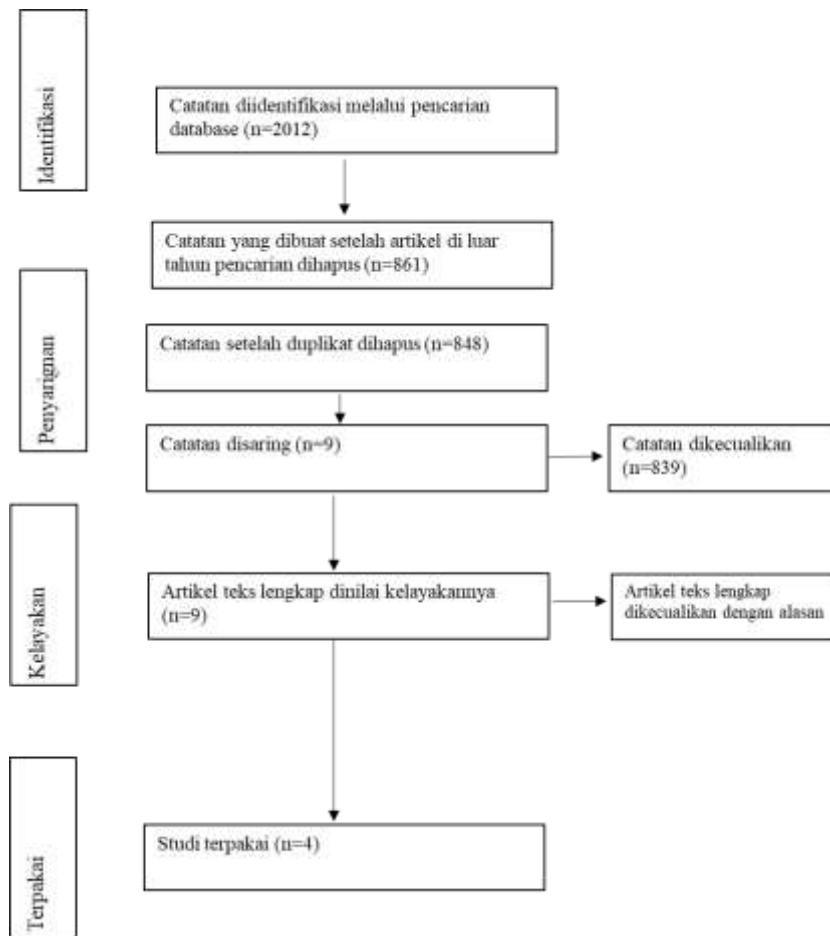
Menurut Adams et al. (2014), isu keberlanjutan pada sektor publik seperti pemerintah daerah, universitas, dan rumah sakit di Indonesia belum mendapat perhatian yang banyak dari peneliti keberlanjutan.

Identifikasi Studi yang Relevan

Studi yang dipilih harus sesuai dengan kriteria inklusi. Kriteria inklusi termasuk penelitian berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris, penelitian yang diterbitkan antara tahun 2016 hingga 2023, semua jenis penelitian akan dimasukkan dalam tahap seleksi ini, dan penelitian yang tersedia secara penuh dan dapat diakses. Di sisi lain, studi yang tidak sesuai dengan *P (Population)*, *C (Concept)*, *C (Context)* merupakan kriteria eksklusi yang dikeluarkan dalam data penelitian. Strategi pencarian literatur dijelaskan dalam Gambar 1.

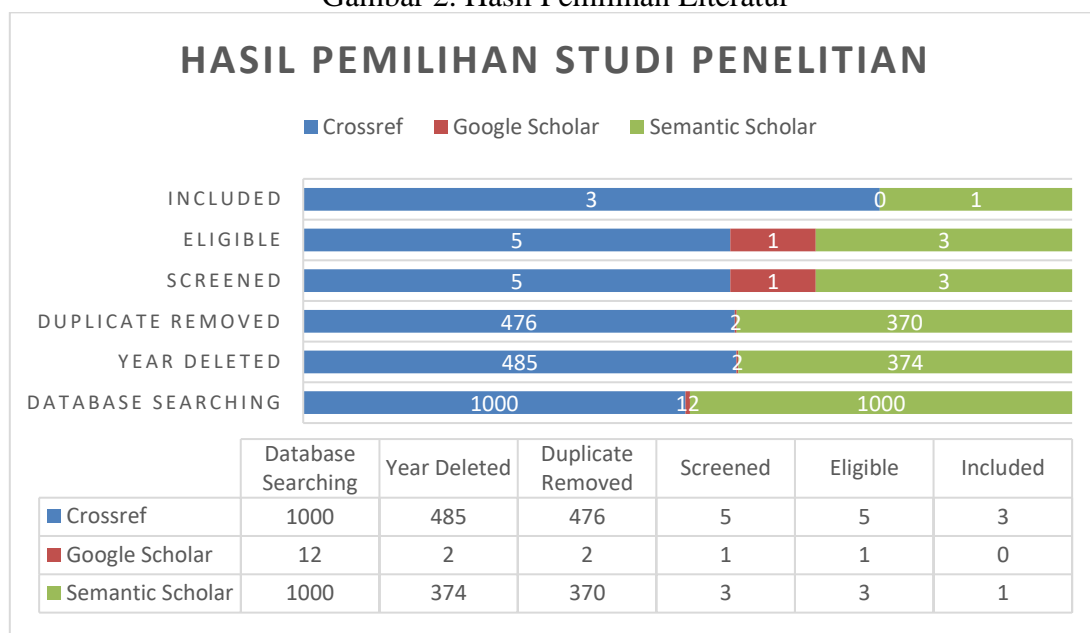


Gambar 1. Strategi Pencarian Literatur



Secara rinci, hasil pemilihan artikel literatur sebagai data penelitian tersaji sebagaimana Gambar 2.

Gambar 2. Hasil Pemilihan Literatur





Sumber literatur diperoleh melalui pencarian dengan menggunakan aplikasi Harzing's Publish or Perish yang menghasilkan data source tersedia dari *Crossref*, *Google Scholar*, dan *Semantic Scholar*. Kata kunci yang digunakan terbatas untuk pencarian literatur dalam Bahasa Inggris antara lain *sustainability reporting*, dan lebih khusus disortir dengan kata kunci *government*, *implementation* dan *development*. Sementara itu, pencarian kata kunci literatur yang relevan dalam Bahasa Indonesia masih terbatas ditemukan. Strategi penelusuran ini bertujuan untuk memperoleh penelitian yang sudah dipublikasikan dan memiliki sitasi yang lebih tinggi. Berdasarkan pencarian pada aplikasi pada *data source* yang tersedia dengan menggunakan kata kunci yang telah ditentukan sebelumnya, ditemukan 2012 artikel berkaitan dengan topik penelitian. Artikel dari setiap data source yang tersedia berasal dari *Crossref* sebanyak 1000 artikel, *Google Scholar* 12 artikel, dan *Semantic Scholar* 1000 artikel.

Seleksi Studi

Proses seleksi studi dilakukan dengan melakukan skrining berdasarkan judul dan abstrak. Setelah itu, artikel-artikel yang lolos dari tahap skrining dipelajari secara menyeluruh untuk menentukan apakah artikel-artikel tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Artikel-artikel yang sesuai selanjutnya disusun dalam bentuk tabel yang mencakup informasi tentang nama penulis, tahun penerbitan, judul, desain penelitian, hasil, dan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil fase identifikasi didapatkan 2012 artikel berkaitan dengan topik penelitian. Artikel dari setiap data source yang tersedia berasal dari *Crossref* sebanyak 1000 artikel, *Google Scholar* 12 artikel, dan *Semantic Scholar* 1000 artikel. Dalam fase penyaringan didapatkan sembilan artikel penelitian. Penyaringan dilakukan dengan menghapus hasil pencarian di luar tahun yang sesuai dengan tujuan penelitian dan artikel yang memiliki duplikasi dengan artikel lainnya yang ditemukan. Pada fase kelayakan didapatkan sembilan artikel dan dapat dilanjutkan ke fase berikutnya. Pada fase terakhir, artikel penelitian yang dipilih sebagai rujukan utama sebanyak empat artikel yang berasal dari data source *Crossref* sebanyak tiga artikel dan *Semantic Scholar* sebanyak satu artikel. Pemilihan akhir artikel ini dilakukan dengan pertimbangan faktor kesesuaian terhadap pertanyaan penelitian dan jumlah sitasinya. Selanjutnya, artikel yang dipilih dilakukan analisis. Adapun artikel final yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar data penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sofia et al. (2016), Niemann & Hoppe (2018), Othman et al. (2017), dan Hossain (2018).

Penelitian Sofia et al. (2016) bertujuan untuk mengidentifikasi indikator-indikator pengungkapan pelaporan keberlanjutan yang terkait dengan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial pemerintah daerah, serta menentukan faktor-faktor penting yang harus diungkapkan oleh pemerintah daerah dalam laporan keberlanjutannya. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor utama model pengungkapan laporan keberlanjutan terdiri dari lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pengungkapan faktor lingkungan memuat 21 indikator, faktor ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator pengungkapan, sedangkan faktor sosial memuat tiga dimensi yaitu ketenagakerjaan (8 indikator), masyarakat (12 indikator), dan hak asasi manusia (10 indikator).

Penelitian Niemann, & Hoppe, (2018) menyajikan kerangka kerja yang cocok untuk menilai praktik dan hasil di kehidupan nyata. Evaluasi eksplorasi di Amsterdam, Basel, Dublin, Freiburg, Nuremberg dan Zurich menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan dapat bermanfaat bagi perubahan organisasi, manajemen dan komunikasi namun juga menyebabkan 'kelelahan' dan penghentian.

Penelitian Othman et al. (2017) mengkaji pengungkapan keberlanjutan pemerintah daerah Selandia Baru selama lima tahun sebelum adanya perubahan dalam lingkungan legislatif melalui diperkenalkannya Rancangan Undang-Undang Pelaporan Lingkungan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaporan lingkungan hidup pemerintah daerah berfokus pada



informasi non-moneter tingkat yang lebih rendah, dan informasi moneter. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dewan lokal Selandia Baru secara sukarela melaporkan informasi keberlanjutan yang konsisten dengan indikator GRI walaupun tidak adanya pedoman wajib.

Penelitian Hossain (2018) meneliti praktek pelaporan keberlanjutan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah daerah di Australia Barat yang saat itu masih belum memiliki pedoman pelaporan wajib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas pemerintah daerah di Australia Barat meningkatkan pengungkapan keberlanjutan untuk melegitimasi inisiatif sosial dan lingkungan. Hasil penelitian ini berimplikasi pada kebijakan bagi regulator dan/atau pemerintah di Australia Barat, dan implikasi praktis bagi otoritas dewan lokal dan/atau manajer dalam mengembangkan kesadaran akan operasi berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi terhadap meningkatnya kesadaran otoritas pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan layanan yang berkelanjutan.

Hasil analisis konten terhadap keempat artikel terpilih menunjukkan bahwa langkah-langkah penyusunan protokol penelitian pada dasarnya hampir serupa. Namun, ketika ditelaah secara mendalam, setiap artikel yang menjelaskan langkah-langkah penyusunan protokol menguraikan komponen yang berbeda-beda secara rinci. Hasil telaah artikel jurnal atas informasi umum tersaji dalam Tabel 2.

Tabel 2. Telah Artikel Jurnal

No	Penulis	Metode Pengumpulan dan Pemrosesan Data	Tujuan/Pertanyaan Penelitian
1	Sofia et al. (2016)	Studi dokumentasi dan kuesioner dengan analisis faktor terkonfirmasi.	Mengidentifikasi indikator pengungkapan pelaporan keberlanjutan oleh pemerintah daerah terkait ekonomi, lingkungan dan sosial.
2	Niemann, & Hoppe, (2018)	Analisis dokumen and pendapat dari informan kunci	Bagaimana praktik pelaporan keberlanjutan berkembang sekaligus sebagai pionir pada pemerintah lokal Eropa, dan apa dampaknya?
3	Othman et al. (2017)	Analisis konten	Menilai informasi sosial dan lingkungan yang dilaporkan oleh dewan lokal dalam berbagai dokumen publik. Meneliti tren dan orientasi pelaporan keberlanjutan oleh pemerintah daerah Selandia Baru dengan mengidentifikasi kesenjangan antara praktik pemerintah daerah dan pedoman Global Reporting Initiative (GRI).
4	Hossain (2018)	Analisis Konten Situs Web	Menginvestigasi luas, volume, sifat dan pola pelaporan keberlanjutan oleh otoritas pemerintah daerah WA (<i>Western Australian</i>).

Pentingnya Pelaporan Keberlanjutan pada Sektor Pemerintah

Berdasarkan keempat studi yang telah dipaparkan sebelumnya, pelaporan keberlanjutan memiliki manfaat yang dapat diadaptasi oleh Pemerintah Indonesia. Pertama, pelaporan keberlanjutan memberikan nilai utama bagi masyarakat. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang telah menunjukkan pola peningkatan pelaporan situs web tentang informasi keberlanjutan ketika organisasi berusaha berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan untuk melegitimasi perilaku keberlanjutan (Jose & Lee 2007; Coupland 2006; Rikhardsson et al., 2002). Kedua, pelaporan keberlanjutan merupakan alat pembelajaran, manajemen, dan komunikasi. Ketiga, pelaporan keberlanjutan dapat menciptakan efisiensi anggaran. Keempat, pelaporan keberlanjutan merupakan bukti manfaat organisasi, misalnya, mengenai peningkatan motivasi staf dan kapasitas manajemen data. Kelima, pelaporan keberlanjutan memberikan bukti empiris bahwa praktik keberlanjutan penting. Keenam, pelaporan keberlanjutan



memberikan bukti empiris bahwa pengungkapan keberlanjutan dapat mewujudkan harapan masyarakat.

Risiko Pelaporan Keberlanjutan pada Sektor Pemerintah

Implikasi penerapan pelaporan keberlanjutan juga perlu menjadi pelajaran berharga yang perlu dipahami sebelum penerapan pelaporan keberlanjutan dilakukan secara komprehensif pada pemerintah Indonesia. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat banyak hal yang masih harus dipastikan terlebih dahulu agar tahapan implementasi pelaporan keberlanjutan yang diusulkan dapat berjalan optimal. Komitmen pimpinan organisasi di sektor pemerintah perlu dipastikan karena memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pelaporan keberlanjutan. Penyempurnaan payung hukum pelaporan keberlanjutan di Indonesia seperti pengaturan pihak yang wajib melaporkan, konten yang perlu dilaporkan, format pelaporannya perlu dilakukan. Selain itu, sumber daya manusia yang mampu secara teknis dapat mengukur, mencatat, dan melaporkan terkait aspek ekonomi, lingkungan dan sosial perlu dipersiapkan. Implikasi penerapan pelaporan keberlanjutan yang masih belum dipahami oleh banyak pihak akan sulit dilakukan dengan baik. Adapun pengungkapan aktivitas dalam pelaporan keberlanjutan pemerintah ketika diberlakukan, mungkin belum dilakukan atas kesadaran pengungkapan melainkan karena adanya tekanan tren ataupun kewajiban pengungkapan.

PENUTUP

Simpulan

Pengungkapan laporan keberlanjutan dalam setiap entitas tergantung pada kebutuhan pemangku kepentingan utama termasuk adanya tekanan dari pihak eksternal organisasi. Pemerintah Indonesia dan PBB bekerja sama untuk mencapai SDGs secara efektif. Pada 2016, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim pada Upacara Tingkat Tinggi Penandatanganan Perjanjian Paris (*high-level Signature Ceremony for the Paris Agreement*). Pelaporan keberlanjutan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas atas pencapaian SDGs dan tindaklanjut Perjanjian Paris. Pelaporan keberlanjutan tidak hanya melaporkan aktivitas ekonomi, lingkungan dan sosial, namun pengukuran atas aktivitas tersebut berdasarkan indikator dan dijamin oleh *assurer*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor pemerintah membutuhkan persiapan matang agar dapat meminimisasi risiko seperti kelelahan dan penghentian pelaporan. Persiapan tersebut antara lain regulasi, komitmen pimpinan, sumber daya manusia, dan keputusan pada *mandatory/voluntary disclosure*.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, fitur umum pencarian masih terbatas pada sumber data yang tersedia. Masih banyak sumber data yang belum dieksplorasi lebih jauh. Kedua, penelitian ini lebih banyak menggunakan referensi dengan lokus pada pemerintah daerah pada negara-negara tertentu dan tidak memetakan berdasarkan negara maju dan negara berkembang sehingga belum benar-benar mencerminkan kondisi yang dimiliki Indonesia sebagai negara berkembang.

Saran

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih jauh terkait praktik pelaporan keberlanjutan di sektor pemerintah dengan memperluas kata kunci dan database pencarian sehingga dapat menghasilkan penelitian yang komprehensif. Kehadiran laporan keberlanjutan diharapkan dapat membantu pencapaian SDGs dan meningkatkan legitimasi. Oleh karena itu pemerintah harus mengambil langkah terbaru untuk mengimplementasikan pelaporan keberlanjutan. Pemerintah sebagai regulator harus mulai mempertimbangkan dan memperbaiki regulasi yang berlaku, parameter serta standar yang digunakan dalam pelaporan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. A., Muir, S., & Hoque, Z. (2014). Measurement of sustainability performance in the public sector. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 5(1), 46–67. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-04-2012-0018>
- Alsayegh, M. F., Ditta, A., Mahmood, Z., & Kouser, R. (2023). The role of sustainability reporting and governance in achieving sustainable development goals: an international investigation. *Sustainability*, 15(4), 3531. <https://doi.org/10.3390/su15043531>
- Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. *International journal of social research methodology*, 8(1), 19-32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Ashforth, B. E., & Gibbs, B. W. (1990). The double-edge of organizational legitimation. *Organization Science*, 1(2), 177–194. <http://dx.doi.org/10.1287/orsc.1.2.177>
- Bappenas. (nd). SDGs knowledge hub: agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Coupland, C. (2006). Corporate social and environmental responsibility in web-based reports: currency in the banking sector? *Critical Perspectives on Accounting*, 17,(7), 865–881. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2005.01.001>.
- Damayanti, A., & Hardiningsih, P. (2021). Determinan pengungkapan laporan berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 75-189. <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i1.2756>
- Dienes, D., Sassen, R., and Fischer, J. (2016). What are the drivers of sustainability reporting? A systematic review. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 7(2), 154–189. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2014-0050>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: social values and organizational behavior. *The Pacific Sociological Review*, 87 (Suppl 1), 299–317. <https://doi.org/10.1039/F29817702213>
- Farhana, S., & Adelina, Y. E. (2019). Relevansi nilai laporan keberlanjutan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 615-628. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.36>
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2014). Teori akuntansi, edisi 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- GRI. (2016). GRI - 101: Landasan 2016. Global Reporting Initiative. <https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/>
- Hossain, M. M. (2018). Sustainability reporting by Australian local government authorities. *Local Government Studies*, 44(4), 577-600. <https://doi.org/10.1080/03003930.2018.1471397>
- Jose, A., & Lee, S. M. (2007). Environmental reporting of global corporations: a content analysis based on website disclosures. *Journal of Business Ethics*, 72(4), 307–321. doi:10.1007/s10551-006-9172-8.
- Kurniawan, T., Sofyani, H., & Rahmawati, E. (2018). Pengungkapan sustainability report dan nilai perusahaan: studi empiris di Indonesia dan Singapura. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 16(1), 1-20. <http://dx.doi.org/10.30595/kompartemen.v16i1.2100>
- Meutia, I. (2022). *Monograf: perkembangan sustainability report di Indonesia (pendekatan systematic literature review)*. Dapur Kata Kita. <https://repository.unsri.ac.id/74404/>
- Martani, D., Siregar, S. V. N. P., Wardhani, R., Mita, A. F., Tanujaya, E. (2016). *Akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK Buku 1*. Edisi 2. Salemba Empat.
- Maswain, M. J. (2020). *Pengaruh pengungkapan laporan berkelanjutan, tata kelola perusahaan yang baik, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan*. Fakultas Ekonomi

